

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ismi, 2009).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Hanika (2010) berpendapat bahwa kemerosotan yang terjadi pada sektor riil mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemerintah dituntut untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi

yang mantap dan stabil akan mendorong berkurangnya angka kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran.

Era reformasi telah memberikan beberapa perubahan di Negara Indonesia. Salah satu reformasi yang membawa perubahan adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan “Otonomi Daerah”. Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah ini mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mengelola dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah di Indonesia antara lain adalah agar pemerintah daerah mampu memperbaiki pelayanan kepada publik dan mengelola keuangannya secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam menyusun anggaran belanja-belanja seharusnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Salah satu bentuk pelayanan yang baik kepada publik adalah dengan memberikan informasi secara transparan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti laporan keuangan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran belanja daerah agar tepat sasaran. Di dalamnya termasuk juga kebijakan pelayanan untuk mengembangkan dunia usaha dalam aktivitas perekonomian yang lebih kondusif. Dengan adanya aktivitas perekonomian yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah akan meningkatkan perekonomian

daerah dan tidak menutup kemungkinan dapat berfungsi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di masing-masing daerah tersebut. Apabila kondisi tersebut dapat dicapai dengan baik, artinya salah satu dari tujuan otonomi daerah telah tercapai.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dana alokasi dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja daerah seharusnya ditujukan untuk kepentingan pelayanan publik dan digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti penyediaan fasilitas untuk aktivitas pemerintahan itu sendiri dan kegiatan pembangunan fasilitas umum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan pengelolaan APBD dengan baik diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Penyebab kemiskinan itu bervariasi, antara lain mulai dari meningkatnya jumlah kepadatan penduduk yang berada di Pulau Jawa, biaya kehidupan sehari-hari yang semakin mahal membuat masyarakat tidak mampu membiayai kehidupan mereka sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, kurangnya kesadaran akan ilmu pengetahuan dan sempitnya wawasan yang dimiliki masyarakat. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Gambar 1.1.

Kepadatan Penduduk di Indonesia

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa Pulau Jawa digambarkan dengan warna kuning tua, hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah kepadatan penduduk paling banyak, sedangkan pulau yang lain digambarkan dengan warna hijau yang menunjukkan bahwa pulau yang lain memiliki jumlah penduduk yang tidak padat. Penyebab kemiskinan di Pulau Jawa adalah adanya ledakan jumlah kepadatan penduduk yang terus meningkat sehingga secara otomatis menimbulkan kemerosotan pada sektor perekonomian di Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat miskin di Jawa yang tidak mampu membiayai kebutuhan mereka sehari-hari.

Alasan penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, namun pemerintah daerah di Jawa belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan bahkan masih banyaknya masyarakat di Jawa yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGUJIAN TERHADAP TINGKAT “*PRO POOR BUDGETING*” PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh belanja daerah yang meliputi belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, belanja barang atau jasa, dan belanja modal terhadap kemandirian daerah dan tingkat kemiskinan yang dilakukan pada Kabupaten dan Kota yang terdapat di Pulau Jawa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah belanja pegawai tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah?

2. Apakah belanja pegawai langsung berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah?
3. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah?
5. Apakah belanja pegawai tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
6. Apakah belanja pegawai langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
7. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
8. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
9. Apakah kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
10. Apakah kemandirian daerah merupakan variabel intervening pada pengaruh belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap tingkat kemiskinan?
11. Apakah anggaran kabupaten dan kota di Jawa telah pro pada kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai tidak langsung terhadap kemandirian daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai langsung terhadap kemandirian daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja barang dan jasa terhadap kemandirian daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan.
6. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai langsung terhadap tingkat kemiskinan.
7. Untuk mengetahui pengaruh belanja barang dan jasa terhadap tingkat kemiskinan.
8. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan.
9. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap tingkat kemiskinan.
10. Untuk mengetahui kemandirian daerah merupakan variabel intervening pada pengaruh belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap tingkat kemiskinan.

11. Untuk mengetahui anggaran kabupaten dan kota di Jawa telah pro pada kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik tentang pengaruh realisasi APBD terhadap kemandirian daerah dan tingkat kemiskinan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya.

2. Segi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah oleh pengambil kebijakan dan pengelola keuangan daerah, baik dalam mengelola pendapatan maupun belanja daerah khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan masyarakat.